

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) TAMPERAN TERHADAP PERUBAHAN  
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SEKITAR  
(Studi Kasus pada PPP Tamperan Kab. Pacitan)**

**Mizhar Anton S, Mardiyono, Wima Yudho Prasetya**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: mizhar.anton@gmail.com

**Abstract:** *Policies Impact Evaluation of Development of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) against Social Change around the Coastal Economy (Case Studies in Kab. Pacitan, Tamperan PPP). Indonesia as a maritime country which has a sea ocean area of more than 3.5 million km<sup>2</sup>, which is twice bigger than the land area. The very broad seas have potentially huge fish resources. To explore this potential, it will require port as the ship berths, landing fish, facilitate fishing operations, and marketing. By the development of PPP Tamperan, surrounding coastal communities sought a positive impact on the socio-economic changes in the society by utilizing existing economic opportunities of PPP Tamperan development. The research findings show that, the government policies of development of PPP Tamperan has relation with economic impact and social changes to coastal communities. The impact of the changes experienced by the surrounding coastal communities is that there is a physical change in port facilities and infrastructure which is better than before. Another change is that with the employment of public enterprises and an increase in total revenues when compared with the pre-existing policy.*

**Keywords:** *policy, development, impact, sosial economic*

**Abstrak:** *Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (Studi Kasus pada PPP Tamperan Kabupaten Pacitan).* Indonesia sebagai Negara maritim mempunyai wilayah laut seluas lebih dari 3,5 juta km<sup>2</sup>, yang merupakan dua kali luas wilayah daratan. Perairan yang sangat luas tersebut mempunyai potensi sumberdaya ikan yang besar. Untuk menggali potensi tersebut diperlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, memperlancar operasi penangkapan, dan pemasaran. Dengan adanya pembangunan PPP Tamperan tersebut diupayakan masyarakat pesisir sekitar mendapatkan dampak positif terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dari pembangunan PPP Tamperan. Dari hasil penelitian ini diketahui, adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembangunan PPP Tamperan memberikan dampak perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir sekitar. Dampak perubahan yang dialami oleh masyarakat pesisir sekitar adalah adanya perubahan fisik sarana dan prasarana pelabuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang lain adalah dengan adanya penyerapan tenaga kerja dari usaha masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan bila dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tersebut.

**Kata kunci:** *kebijakan, pembangunan, dampak, sosial ekonomi*

---

## **Pendahuluan**

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan manusia, hal ini akibat dari keinginan manusia untuk selalu berkembang dan maju dari waktu ke waktu. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*daerah*). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang

mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat

harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Menurut Triatmodjo (2010, h.401) Indonesia sebagai negara maritim mempunyai wilayah laut seluas lebih dari 3,5 juta  $km^2$ , yang merupakan dua kali luas wilayah daratan. Perairan yang sangat luas tersebut mempunyai potensi sumberdaya ikan yang besar. Untuk menggali potensi tersebut diperlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, memperlancar operasi penangkapan, pemasaran, dan pembinaan nelayan.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan dulunya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan yang mulai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sendiri pada tahun 1977. PPI sendiri mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan melalui Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan. Pelaksanaan pembangunan PPP Tamperan dimulai pada tahun 2003 dengan dana dari APBN (dana dekosentrasi), Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR), kemudian dilanjutkan sharing dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBD Kabupaten Pacitan. Adanya fasilitas seperti pelabuhan akan mendorong geliat ekonomi daerah karena aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akan semakin tinggi. Sehingga bisa mendorong percepatan pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, potensi perkembangan sektor informal pendukung lainnya dan terbentuknya interaksi sosial baru bagi masyarakat. Dengan adanya pembangunan PPP Tamperan tersebut diupayakan masyarakat pesisir sekitar mendapatkan dampak positif terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dari pembangunan PPP Tamperan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pembangunan PPP Tamperan, mendeskripsikan dan menganalisis dampak sosial dan dampak ekonomi pembangunan PPP Tamperan di Kabupaten Pacitan.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Pembangunan

Bryant dan White (1982) dikutip oleh Suryono (2004, h.35), menyebutkan terdapat 5 (lima) implikasi yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan, yaitu:

- a) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu atau kelompok (*capacity*);

- b) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan system nilai dan kesejahteraan (*equity*);
- c) Pembangunan berarti mendorong kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang adap adanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
- d) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dan membangun secara mandiri (*sustainability*); dan
- e) Pembangunan merata mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (*simbiosismutualis*) dan saling menghormati (*interdependensi*).

Sedangkan menurut Siagian (1983, h.3) dikutip oleh Suryono (2004, h.21) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

### 2. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2009, h.184) menjelaskan bahwa tujuan pokok dari evaluasi kebijakan bukanlah untuk menyalahkan, akan tetapi untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dari sebuah kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan seringkali dipahami sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan saja, menurut Winarno, 2002 yang dikutip oleh Nugroho (2009, h.184). Sebenarnya evaluasi kebijakan tidak terbatas hanya evaluasi terhadap implementasi kebijakan saja, akan tetapi evaluasi terhadap seluruh proses kebijakan.

Evaluasi penting baik bagi tahap perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, sebab evaluasi ada pada tiap tahap dalam pembuatan kebijakan. Jadi dari sana akan dinilai apa yang menjadi *output* dan/ atau *outcome* suatu kebijakan yang selanjutnya menjadi *input* guna merevisi kebijakan baik dalam bentuk perbaikan implementasi kebijakan maupun perumusan kebijakan kembali.

### 3. Dampak Kebijakan

Suatu kebijakan dapat dikatakan atau dinilai berhasil jika kebijakan tersebut menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. Menurut William Dunn yang dikutip oleh Wibawa (1994, h.5) menyebutkan “dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik

maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan”. *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan *output* dan dampak itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan.

Menurut Weiss seperti yang dikutip oleh Wibawa (1994, h.39) mengatakan bahwa ada tiga persoalan yang perlu diperhatikan dalam melihat dampak kebijakan. Pertama, wilayah program, apakah program berlingkup nasional, propinsi, kota, kecamatan atau desa. Kedua, ukuran program, berapa jumlah individu yang dilayani untuk setiap satuan wilayah program. Ketiga, kebaruan program, apakah dampak yang diharapkan oleh program itu dianggap baru.

Evaluasi kebijakan publik banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan atau *policy outcomes*, bukan hanya hasil atau *policy outputs* dari sebuah kebijakan publik. Maka disini perlu ditegaskan bahwa hasil kebijakan berbeda dengan dampak kebijakan. Menurut Islamy (2007, h.114) hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya sebuah kebijakan publik.

#### 4. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat. Perubahan sosial merupakan variasi dan cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideology maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Soemardjan dan Soemadi (1993, h.45) perubahan sosial juga merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial meliputi perubahan pada proses sosial sehingga dalam penelitian ini membatasi perubahan sosial pada indikator yang meliputi perubahan pada persepsi dan interaksi sosial.

Menurut Sumatmadja dalam Yulianti dan Poernomo (2003, h.37), perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat dan merupakan tuntutan

kehidupan dalam mencari kestabilan. Perubahan sosial ini didukung oleh adanya perkembangan kuantitas dan kualitas anggota masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan proses sosial yang terjadi pada masyarakat karena adanya inovasi, difusi, dan penemuan baru sehingga menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas masyarakatnya dan mempengaruhi sistem sosial masyarakat.

#### 5. Perubahan Ekonomi

Dalam pembangunan sector perikanan dalam hal ini khususnya pada fasilitas pendukungnya yaitu berupa pelabuhan perikanan pada beberapa daerah mengarah kepada pembangunan ekonomi, dimana dampak yang ditimbulkan pada sector ekonomi merupakan hal yang berpengaruh terhadap semua kalangan, seperti bagi pemerintah daerah dan yang paling utama bagi masyarakat pesisir sekitar.

Dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah dimana pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan yang amat penting untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Hasibuan (1987, h.17), pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terus menerus yang diusahakan dengan jalan memanfaatkan sumber-daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Sehingga kita perlu melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

#### 6. Pelabuhan Perikanan

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan, seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdandan Taylor yang dikutip dalam Moleong (2013, h.3) menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari status keutuhan.

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan focus penelitian sebagai berikut: 1) Kebijakan Pembangunan PPP Tamperan; 2) Dampak kehidupan Sosial Masyarakat Pesisir Sekitar; 3) Dampak kehidupan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar

Lokasi penelitian ini adalah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan di Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan, yang dimana masyarakat pesisir sekitar yang merasakan dampak adanya pelabuhan perikanan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2013, h.337). Analisis model interaktifinimelalui 3 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

### 1. Kebijakan Pembangunan PPP Tamperan

Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, alasan dasar kenapa pentingnya PPI Tamperan untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPP Tamperan karena masih tingginya potensi perikanan tangkap yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun tingginya potensi perikanan tangkap tersebut tidak didukung dengan fasilitas pelabuhan yang baik dan memadai. Tidak adanya dermaga, kolam labuh, maupun tanggul penahan gelombang berakibat kurang maksimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang ada. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan status dari PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan.

Dalam kebijakan penetapan pembangunan dan peningkatan status yang sebelumnya adalah PPI Tamperan yang kemudian menjadi PPP

Tamperan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan KEPMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 48 tahun 2007 tentang Peningkatan Status Peningkatan PPI Tamperan Menjadi PPP Tamperan. Kemudian, PPP Tamperan Pacitan dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan dijalankan oleh UPPPP Tamperan. UPPPP Tamperan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang berada di PPP Tamperan. Semuanya telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 061.1/568/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan

### 2. Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Pesisir Sekitar

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Pacitan yang mengalami proses pembangunan PPP Tamperan, merupakan suatu gejala wajar jika dilihat dari arti pembangunan yang merupakan usaha sadar, terencana dan terus menerus yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan yang dimiliki. Perubahan persepsi pada masyarakat Kabupaten Pacitan khususnya masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap adanya PPP Tamperan dan perubahan pandangan tersebut dapat mengarah pada arah yang positif atau negatif.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan, maka diperoleh data yang menyatakan bahwa terjadi perubahan persepsi yang mengarah pada arah positif. Masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan mengalami perubahan kearah yang baik dengan adanya PPP Tamperan saat ini. Dikarenakan masyarakat Desa Tamperan sendiri merasa ada perubahan pada daerahnya yang dulunya sepi sekarang menjadi lebih ramai. Selain itu menurut masyarakat Desa Tamperan sendiri yang berprofesi sebagai nelayan, adanya PPP Tamperan mempermudah nelayan dalam melakukan aktifitas sebelum ataupun sesudah melaut dibandingkan dulu sebelum adanya PPP Tamperan yang mana nelayan harus mengeluarkan tenaga ataupun biaya lebih.

Sedangkan perubahan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat pesisir sekitar dapat

disimpulkan dengan adanya pembangunan dan peningkatan status PPP Tamperan yang akan mengakibatkan banyaknya masyarakat dari luar wilayah pesisir Desa Tamperan yang datang baik dalam tujuan jual beli maupun seperti nelayan andon akan mempengaruhi interaksi sosial masyarakat pesisir sekitar. Dalam hal ini perubahannya mengarah pada segi positif dan juga negatif.

### **3. Dampak Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar**

Pengembangan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan, memberikan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat pesisir sekitar Desa Tamperan. Berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian, diketahui bahwa masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan membuka berbagai usaha. Melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membuka berbagai macam usaha yang secara tidak langsung juga memberikan kesempatan berwirausaha bagi masyarakat sekitar lokasi PPP Tamperan. Bentuk usaha yang dilakukan masyarakat di lokasi PPP Tamperan yaitu rumah makan/warung makan 20 buah, *cafe* 1 buah, kios 8 buah, dan pemondokan 68 buah. Dari berbagai macam usaha utamanya rumah makan/warung makan dan kios tersebut tentunya menyerap sejumlah tenaga kerja yang kebanyakan juga adalah warga sekitar. Mulai dari suami atau istri, anak, saudara, bahkan tetangga dari pemilik usaha yang merupakan penduduk Desa Tamperan setempat. Penyerapan tenaga kerja juga ada pada sektor jasa. Bentuk usaha jasa di PPP Tamperan sendiri di kelola dalam kelompok Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Pacitan. Dari data yang didapat menunjukkan bahwa ada sejumlah 65 orang yang bekerja sebagai pemanol, bongkar muat dan keamanan di lokasi PPP Tamperan.

Dengan membuka usaha di sekitar lokasi PPP Tamperan, masyarakat pesisir sekitar dapat meningkatkan pendapatannya. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, diketahui pendapatan masyarakat yang bekerja disekitar lokasi PPP Tamperan memberikan dampak ekonomi yang positif yaitu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar Desa Tamperan.

### **Kesimpulan**

Kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan di Desa Tamperan, Kelurahan Sidoharjo,

Kabupaten Pacitan, ditingkatkan statusnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 48/MEN/2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan. Pembangunan dan peningkatan status PPP Tamperan ditujukan untuk memberikan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar kelas pelabuhan perikanan pantai bagi masyarakat nelayan Kabupaten Pacitan. Pengelola teknis PPP Tamperan diserahkan kepada UPPPP Tamperan agar mempermudah pengawasan serta pengendalian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dasar pembentukan UPPPP Tamperan sendiri berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 061.1/568/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata kebijakan tersebut secara tidak langsung telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat pesisir sekitar, khususnya pada masyarakat Desa Tamperan. Dari segi sosial, perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan persepsi masyarakat Desa Tamperan terhadap adanya PPP Tamperan yang menilai dengan adanya PPP Tamperan memberikan perubahan kondisi lingkungan yang lebih ramai dibandingkan dulunya yang sepi dan tidak banyak orang yang tertarik untuk sekedar melihat-lihat aktifitas di PPI Tamperan atau membeli ikan secara langsung. Dari segi fisik bangunan juga tidak lepas dari penilaian nelayan yang merasa bahwa dengan adanya PPP Tamperan mempermudah nelayan untuk melakukan kegiatan perikanan. Selain perubahan persepsi, juga terjadi perubahan interaksi sosial yang terjadi baik di lokasi PPP Tamperan maupun di lingkungan perkampungan masyarakat Desa Tamperan. Perubahan interaksi sosial yang dialami oleh masyarakat Desa Tamperan terjadi dikarenakan adanya pedagang ikan yang datang dari luar desa atau bahkan dari luar kabupaten yang datang ke PPP Tamperan untuk membeli ikan dari pengepul. Selain itu perubahan interaksi sosial yang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat Desa Tamperan adalah terjadinya konflik antara warga Desa Tamperan dengan nelayan andon yang datang dari luar kota bahkan luar pulau.

Sedangkan dari segi ekonomi, perubahan tersebut dapat dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang terjadi di sekitar lokasi PPP

Tamperan maupun di dalam lokasi PPP Tamperan sendiri. Berbagai bentuk usaha diciptakan oleh masyarakat Desa Tamperan mulai dari usaha perdagangan hingga usaha jasa seperti rumah makan dan kios/toko. Sedangkan di dalam lokasi PPP Tamperan, penyerapan tenaga kerja juga ada pada tenaga pemanol, bongkar muat kapal, kuli, petugas kebersihan

dan juru timbang di TPI PPP Tamperan. Selain memberikan kesempatan kerja, perubahan ekonomi juga terjadi pada jumlah pendapatan masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja yang terjadi. Karena sebelumnya masyarakat hanya berprofesi sebagai nelayan saja atau bahkan tidak bekerja sama sekali.

---

## Daftar Pustaka

- Hasibuan, M.S.P. 1987. **Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan**. Yogyakarta: PT Piara Kencana.
- Islamy, Irfan. 2007. **Prinsip-prinsip Penyusunan Kebijakan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 48 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan**
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan**
- Moleong. Lexy J. 2013. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2009. **Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi**. Jakarta: PT Gramedia.
- Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi. 1993. **Setangkai Bunga Sosiologi**. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit FE UI.
- Suryono, Agus. 2004. **Pengantar Teori Pembangunan**. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Wibawa, Samodra. 1994. **Evaluasi Kebijakan Publik**. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo. 2003. **Sosiologi Pedesaan**. Malang: Risalah Kerto Pustaka Utama.